BAB III
PERKEMBANGAN DALAM BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA DI KOLONISASI SUKADANA TAHUN 1935-1942

A. Perkembangan Pemukiman Para Kolonis Sukadana

Penduduk Jawa dan Madura yang mengalami krisis mulai menginginkan kehidupan mereka yang lebih baik lagi, oleh karena ini pemerintah Belanda memikirkan upaya yang akan diberikan. Dengan mengadakan program Kolonisasi pemerintah memikirkan segala upaya dan penghidupan bagi para penduiduk, terutama pemukiman baru bagi para Kolonis ini.

1. Gedong Dalem

Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda membuat upaya untuk membuka daerah-daerah baru. Salah satunya adalah rencana Kolonisasi ke Metro, diawali dengan pembukaan daerah Kolonisasi baru yang bernama Gedong Dalem. Daerah ini terletak disebelah utara Tanjung Karang. Gedong Dalem sudah ditetapkan sebagai rintisan jalan untuk jalan didalam hutan dan untuk memperluas daerah Way Raman. Perundingan pertama menetapkan tempat yang akan dijadikan tempat untuk kedatangan para Kolonis, diadakan juga persediaan bahan untuk membuat atap. Kolonisasi Gedong Dalem inilah awal mula dari pembukaan Kolonisasi baru yang besar, yang disebut Kolonisasi Sukadana.

Gotong royong dalam babad alas di Metro bukanlah hal mudah. Tanpa bekal yang mereka bawa dari tanah asal. Hanya keinginan dan semangat untuk melanjutkan hidup untuk terbangunnya saluran irigasi lengkap dengan bendungan 43 sebagai sumber pemasok air. Masyarakat transmigran dan masyarakat Lampung membabat hutan belantara untuk areal perladangan dan areal persawahan. Dalam perjalanannya, proyek Gedong Dalam ini hampir mengalami kegagalan, karena pada saat itu timbul gejolak di tengah-tengah para kolonis. Mereka tidak mau dipekerjakan sebagai buruh perkebunan Pemerintah Belanda. Mereka bersikeras menjadi petani sawah dengan fasilitas irigasi teknis yang memadai. Para kolonis ingin melanjutkan tradisi mereka sebagai petani sebagaimana yang telah mereka kerjakan atau lakukan di daerah asalnya. Akhirnya keinginan para kolonis untuk menjadi petani sawah mendapat respon baik dan ternyata diakomodir oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebelum usulan para kolonis dieksekusi dan disetujui oleh pihak pemerintah, maka dilakukan

studi kelayakan. Pemerintah Belanda mengkaji kemungkinan- 44 kemungkinan dicetaknya areal sawah di areal kolonisasi Gedong Dalam jika membendung Way Sekampung di Tigeneneng sebagai sumber pemasok air (Muzakki, 2014:33)

Tinggal di bedeng belantara bukanlah hal mudah bagi para pendatang dari Pulau Jawa itu. Para kolonis harus mampu bertahan dari ancaman binatang buas dan berbagai penyakit. Mereka harus bisa menaklukkan alam yang terkadang tidak bersahabat. Obat-obatan dan garam ketika itu masih sangat terbatas. Ketika musim penghujan datang, genangan air terjadi di sekitar wilayah bedeng. Genangan air itulah yang menyebabkan tumbuh kembangnya nyamuk. Para kolonis ketika itu sangat sulit mendapatkan garam dan obat-obatan. Garam sangat diperlukan untuk mencegah penyakit dan mengusir ular. Tidak adanya stok garam di daerah kolonisasi baru, penyakit malaria, disentri, dan kolera pun mewabah dengan cepat. Beberapa anggota keluarga kolonis banyak yang tidak bisa diselamatkan nyawanya karena wabah penyakit itu. Ratusan keluarga kolonis itu kemudian dipindahkan ke lokasi lain, yaitu di Gedong Dalam. Gedongwani pun akhirnya menjadi desa tua dan tetap menjadi belukar setelah ditukar lokasinya dengan masyarakat setempat. Secara perlahan, daerah baru itu mulai dibuka dan sebuah desa dibangun para kolonis secara bergotong royong. Selain membangun rumah dan jalan, warga baru itu juga turut membangun bendungan Argo Guruh di desa Bumi Agung, Natar, Lampung Selatan. Setelah menjadi bangunan kokoh dan permanen, Bendungan Argo Guruh menjadi salah satu penopang kehidupan warga wilayah Metro dan Lampung Timur (Saroso dan Saifuddin, 2012:18).

Luas daerah Kolonisasi ini tak kurang dari 47.000 bouw. Dari 7000 jiwa Kolonis yang dipindahkan dalam tahun 1932 sebagian besar ditempatkan di Gedong Dalem. Akan tetapi terdapat juga dari salah satu Kolonis yang ditempatkan didesa-desa para penduduk asli, seperti way Semah, Kalianda, Way Lima, dan lain-lain. Dengan ini Kolonis tidak perlu berdesaka seperti tahun sebelumnya. Para Kolonis disebar menjadi beberapa Kolonis kecil. Kemudian pada tahun 1934 didatangkan lagi sebanyak 1.375 jiwa dan sebagian besar dipindahkan ke Kolonisasi Sukadana. (Amral Sjamsu,1956:44)

Kolonisasi Sukadana atau yang dikenal dengan kolonisasi Gedong Dalam merupakan bagian onderafdeling dalam Karesidenan Lampung Tengah yang secara geografis terletak di sebelah utara sungai Way Sekampung dan di

sebelah timur jalan kereta api yang menghubungkan Panjang – Palembang. Di daerah inilah, jauh sebelum para kolonis datang, sudah bemukim penduduk asli Lampung yang bermarga Nuban. Oleh sebab itu, menurut Raja Bastari Wijaya Sinungan untuk pertama kali sampai di Sukadana para kolonis melewati desa-desa tua penduduk asli Lampung. Perjalanan harus dilalui dengan memutar arah. Hal ini harus dilakukan karena tidak ada akses atau jalan lain untuk sampai ke Sukadana. Kota-kota tua harus melalui jalan memutar. Adapun desa-desa tua yang harus dilalui para kolonis adalah Tigeneneng – Gunung Sugih – melalui jalur Buyut Udik dan Buyut Ilir – kemudian melewati Batanghari Nuban – Gedong Dalam dan Sukadana. (Muzakki, 2014:26).

Kolonisasi Gedong Dalam kemudian diresmikan oleh Belanda pada tahun 1929 dengan mengadakan upacara. Pelaksanaan upacara dilakukan di lapangan yang terdapat di daerah Gedong Dalam. Kolonisasi Sukadana berubah menjadi kolonisasi Gedong Dalam yang kemudian terbentuk 70 desa atau bedeng di kota Metro, dari 70 bedeng ini dipimpin oleh empat asisten wedana, yang terdiri dari asisten wedana Trimurdjo, Asisten Wedana Pekalongan, asisten wedana Batanghari, dan asisten wedana Sekampung. Dari empat asisten wedana ini kemudian dipimpin oleh wedana yang berkedudukan di kota Metro dan pemerintahannya disebut kabupaten Lampung tengah (wawancara Raja Basatari Wijaya Sinungan dalam Rizky Khairina,6 Januari 2016 di Metro).

Kolonisasi Onderafdeling Sukadana yang bertempat di Gedong Dalam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pada akhirnya lokasi ini berkembang menjadi suatu tempat pemukiman atau berkembang menjadi suatu desa baru sehingga oleh para kolonisasi disebut Jojog. Kata Jojog, bagi para kolonis memiliki makna tersendiri yaitu suatu tempat berakhirnya perjalanan panjang dari daerah asalnya masing-masing. Karena pada saat Kolonisasi terjadi daerah jojok konon menjadi tempat persinggahan sementara (tempat transit) karena wilayahnya tidak jauh dari daerah baru mereka, jadi jojok dijadikan tempat transit sebelum para Kolonis kemudian menyebar keberbagai wilayah Kolonisasi di Sukadana. Pada awal tahun 1940 daerah ini telah berpenduduk 68.087 orang. (Kuswono dkk,2020:57 dan Muzakki, 2014:32)

2. Trimurjo

Setelah dibukanya daerah di Gedong Dalem pemerintah Hindia Belanda berencana untuk membuka daerah baru lagi untuk para Kolonis baru yang akan diberangkatkan lagi dari Jawa dan Madura, dibuka wilayah baru bagi para

Kolonis di Sukadana yaitu Trimurjo sebagai induk desa . Mereka diberangkatkan kembali dengan didata di pelabuhan, bus yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk mengantar mereka ketempat yang ditentukan. Para Kolonis baru diberi padi dari pemukim lama sebanyak 5 pikul atau sekitar 300 kg sebagai upah para Kolonis baru yang telah membantu mereka memanen padi. Lima pikul padi itu untuk mereka makan selama empat hingga lima bulan. Selama hampir dua minggu para Kolonis baru ini mereka tinggal dulu di bedeng yang telah disiapkan oleh Pemerintah sebelum rumah mereka jadi. Sekelompok Kolonis membangun rumah mereka dikunjungi oleh HR. Rookmaker pada saat itu, Rookmaker mengawasi pembangunan pada saat itu karena tempatnya yang masih ditengah hutan. Mereka membangun tempat tinggalnya dengan batang kayu, pengambilan kayu masih sangat sederhana bahkan dapat dikatakan bersifat tradisional. Para pemukim baru ini mendapatkan 100 atap yang terbuat dari daun ilalang dan rumbia yang telah dirangkai, paku juga diberikan oleh pemerintah tetapi bahan lainnya yang mereka butuhkan mereka mencari sendiri di hutan. Setiap pemukim menerima lebih dari 7000 m. (Amral Sjamsu,1956:58)

Pada tahun 1935 mulai membuat sebuah irigasi untuk mengairi tanah seluas 10.000 bouw dan 20.000 bouw daerah yang kedua diairi di daerah Kolonisasi Sukadana, air irigasi ini diambil dari Way Sekampung. Pembuatan irigasi ini dibantu oleh para Kolonis karena ii diharuskan, jika mereka tidak mau mereka tidak diizinkan tinggal di Sukadana dan disuruh untuk tinggal didaerah lain. Pada tanggal 20 Agustus 1936 irigasi mengalir pertama kali di Trimurjo. (Amral Sjamsu,1956:44)

Pembagian tanah kepada para Kolonis ialah 1 bouw tanah dan 1 bouw sawah untuk tiap keluarga. Lahan yang diberikan pemerintah ini diatur agar tidak bisa diperjual belikan oleh para Kolonis pada tahun-tahun pertama, karena mencegah terjadinya ketidak merataan kepemilikan tanah. Pohon yang ditebangi dan hutan yang dibabat habis ini mereka bakar agar lahannya bisa mereka tanami jagung, singkong, kacang-kacangan dan tanaman lainnya yang cepat bertumbuh, ini dilakukan agar mereka bisa mengisi kembali persediaan bahan pangan yang semakin menyusut. Mereka juga menanam kelapa sebagai batas kepemilikan tanah mereka. Dalam pekerjaan ini mereka mengambil contoh dari cara bekerja Kolonis lama dan mendapat bimbingan juga dari Dinas penerangan pertanian. Para Kolonis lama ini mendapatkan bibit-bibit dari para Kolonis lama, dengan ini pemerintah tidak perlu lagi membagikan bibit.

Pada beberapa bulan pertama sambil menunggu panen tanaman mereka, para pemukim baru ini mencari uang tambahan dengan cara menggali saluran irigasi, atau bekerja dengan masyarakat asli Lampung atau di perusahaan industri. Untuk pengerjaan saluran irigasi mereka diberi upah 12 ons beras dan ikan asin untuk pengerjaan permeter kubik tanah, setengahnya mereka masak kemudian sisanya mereka bawa pulang. Saluran irigasi ini dibuat untuk mengairi sawah baru yang para Kolonis tanami padi gogo. Pada tahun 1932 pemerintah mengadakan sistem bawon guna menghemat pengeluaran kas pemerintah, pada sistem ini para Kolonis lama yang menanggung penginapan dan juga makan bagi para pekerja serta memberi upah untuk memotong padi di sawah sampai para pemukim baru ini mendapatkan hasil dari tanaman mereka sendiri. (Kuswono dkk,2020:59)

Para Kolonis terus didatangkan secara bertahap karena Sukadana mengalami perkembangan yang cukup pesat, ini dikarenakan Sukadana termasuk daerah yang luas dan subur tanahnya, sehingga di Sukadana dibangun induk desa baru. Di Sukadana sudah ada 18 desa kecil di Barat Daya, terutama Trimurjo. Sebanyak 5.000 orang dari Jawa dan Madura yang sudah tinggal di desa ini. Trimurjo sebelum tahun 1937 merupakan tempat asisten wedana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kolonisasi. Pejabat administrasi di Trimurjo adalah mantan asisten wedana dari Gedong Tataan. Ia membawa 110 petani yang telah berpengalaman ke lokasi yang sekarang. Kolonis Keluarga juga diadakan pada tahun ini. (Kuswono dkk,2020:60)

Selain itu juga telah diadakan penyelidikan tanah dan pembuatan peta atas 45.000 ha tanah di Sukadana, dari tanah ini telah terdapat tanah seluas 30.000 ha yang dianggap baik oleh Pemerintah untuk wilayah perluasan Kolonisasi. Pengairan juga telah dilakukan penyelidikan tanah dan perluasan pengerjaan irigasi Way Sekampung dapat mengairi daerah seluas 70.000 bouw. Perluasan akan diselidiki kemungkinan pembuatan reservoir sebesar kurang lebih 100 milliun kubik. Tanah pertanian di Sukadana ada 11.072 ha. Jadi dalam waktu 8 tahun Kolonisasi Sukadana sudah mengalahkan Gedong Tataan yang telah diselenggarakan selama 35 tahun itu. (Amral Sjamsu,1956:45)

Kolonisasi Sukadana mengalami banyak kemajuan. Pada akhir tahun sudah ada kurang lebih 91.000 jiwa. Ini dikarenakan sistem penyelenggarakan yang dijalankan lebih baik dari sebelumnya, bukan hanya biayanya yang jauh lebih kecil tetapi juga lebih mudah untuk menarik para pendatang dari Kolonis

Jawa. Kemanusian terbentuknya Metro berawal dari didirikannya induk desa baru yang diberi nama Trimurjo artinya “Tiga Kebahagiaan”. Terdapat juga sumber perairan yang tebagi menjadi 3 irigasi. Pembangunan desa baru ini bertujuan untuk menampung sebagian Kolonis yang sudah datang dan juga akan menampung Kolonis yang segera diberangkatkan berikutnya. Kolonisasi Sukadana ini juga bisa diperluas dengan pembukaan daerah-daerah baru di Pengubuan, Way Seputih, Rumbia, Punggur, Raman dan Way Jepara. (Kuswono dkk, 2020:65)

Residen Lampung mengadakan perundingan dengan Pemerintah Marga untuk menyerahkan kembali hak penguasaan marga atas tanah yang akan disediakan untuk kolonisasi para transmigran dari Jawa, sehingga orang Lampung sendiri tidak lagi mendapat hak atas tanah mereka sendiri karena sudah diambil alih oleh pemerintah. Pemerintah memberikan ganti rugi terhadap hak tanam tumbuh rakyat, seperti kompensasi-kompensasi misalnya membangun sekolah, jalan, dan jembatan, klinik, dan irigasi. Penyerahan tanah ini dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Marga.

Kolonisasi Sukadana ini tidak dimasukan oleh pemimpin kedalam hubungan marga, pemerntah pusat (Departemen) tidak menyetujui akan hal ini, maka pada tahun 1940 Pemerintah akhirnya memasukan Kolonisasi Sukadana kedalam hubungan marga secara berangsur-angsur. Tanah yang dimasukan kedalam hubungan marga ialah tanah Kolonisasi yang telah 3 tahun dibuka dan sedang diselenggarakan Konsolidasi. Setelah masa 3 tahun dan apabila desanya sudah dibangun menurut pola di Jawa, kemudian desa-desa itu diserahterimakan kepada Pemerintah Marga dan berikutnya para kolonis harus membayar pajak kepada marga. Mereka menjadi penduduk marga. (Amral Sjamsu,1956:49)

Penyerahan lahan ini dilakukan dengan senang hati dan sukarela. Hal ini dikarenakan pada tahun 1930 tingkat kepadatan penduduk di daerah bagian selatan Sumatera masih rendah (12 jiwa per km2) maka para marga memberikan tanah yang luas dengan senang hati. Dengan demikian pembebasan wilayah Sukadana secara strategis bisa memberikan dampak positif dengan terbukanya akses antara Tegineneng dengan Gedong Dalem, yang sebelumnya harus dilewati secara memutar.

Kedua Buay (Unyai dan Nuban) telah mengalokasikan tanah marga untuk dijadikan sebuah desa baru yang dihuni oleh para migran yang datang dari tanah

sebrang. Penyerahan tanah marga ini untuk membuka akses baru antara kota-kota tua bagi penduduk pribumi di Lampung. Selama ini untuk sampai di kota tua, penduduk pribumi harus menempuh jalur perairan atau melewati sungai. Mengingat banyak gelombang kolonisasi yang datang, secara tidak langsung akan mempermudah hubungan Sukadana dengan Tegineneng melalui jalur alternatif yaitu Gedong Dalam – Metro – Tegineneng sehingga para pesirah dan dewan marga memberikan tanah marga untuk saudara batu mereka yang berasal dari sebrang.

Para marga ini tidak campur tangan dalam adat istiadat masyarakat Kolonis dan susunan pengurus desa, tetapi para marga hanya campur tangan dalam mengurus hak dan penerimaan uang. Dalam hal penyerahan kemargaan ini mengalami sedikit kesulitan mengenai hak tanah. Akhirnya Pemerintah memberikan solusi atas hak tanah yaitu dengan cara hak tanah perseorang diturunkan secara turun menurun, dan mereka diberikan hak surat tanah dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan. (Amral Sjamsu,1956:49)

Dengan kemajuan yang cukup pesat ini tidak seimbang atas apa yang didapat oleh para Kolonis itu sendiri, Karena didaerah yang cukup maju bahan makan selalu mendapat secara berlebihan, ada juga penduduk yang miskin dan tidak memiliki tanah. Mereka hidup sebagai buruh tani atau buruh lainnya. Kehidupan mereka tidak jauh lebih baik dari kehidupan mereka saat di Jawa, padahal kemajuan dan kemakmuran di Kolonisasi Sukadana ini para Kolonis yang berperan penting, tetapi mereka tidak mendapatkan hasilnya.

Wilayah bedeng dari bedeng 1-67 ditetapkan sebagai desa. Contohnya bedeng 1 disebut Adipuro, bedeng 15 disebut Iring Mulyo dan bedeng 22 disebut Hadimulyo. Bedeng 1-20 masuk kedalam asisten wedana Trimurjo, sedangkan bedeng 21-37 masuk kedalam wilayah Pekalongan. Sedangkan bedeng 38-52 masuk kedalam asisten wedana Batanghari, dan bedeng 53-67 masuk kedalam wilayah asisten wedana Sekampung. (Kuswono dkk,2020:69)

3. Metro

Pemerintah Hindia Belanda mengamati perkembangan para Kolonis di keresidenan Lampung, dengan menilai bahwa para Kolonis telah mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sendiri. Pemerintah membuat suatu tata pemerintahan untuk keharmonisan hidup para Kolonis, Pemerintah juga mengubah nama Bedeng menjadi sebutan Desa. Dalam kesuksesan Pemerintah menjalankan Kolonisasi Sukada ini, Departemen pemerintahan Kolonisal Hindia

Belanda membuat surat keputusan yang mengharuskan pembukaan daerah baru di Lampung. Wilayah bedeng 1 yang berada di Trimurjo dan ratu Belanda mengusulkan bahwa pembukaan daerah baru ini harus berada di pusat Keresidenan, supaya para masyarakat Lampung mampu mengakses jarak ke Ibukota. Pada awal tahun 1935 Kolonisasi Metro memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.659 jiwa. Tingkat kematian juga cukup tinggi pada tahun ini. Mereka memiliki bahan makan yang cukup dan pekerjaan yang memadai, sehingga mereka tidak ingin untuk kembali ke Jawa. (Kuswono dkk,2020:69-70)

Kemudian tanggal 9 Juni 1937 merupakan hari peresmian untuk menetapkan pusat pemerintahan yang berada pada bedeng 15 yaitu Iring Mulyo. Maka kemudian Metro menjadi ibu Kota dari Kolonisasi Sukadana. Karena perkembangan penduduk yang cepat, maka tempat ini dijadikan kawedanaan. Jumlah kolonis yang dipindahkan ke Sukadana dalam tahun 1937 ada 6.176 jiwa, dalam hal ini termasuk kolonis keluarga yang baru diselenggarakan dalam tahun 1937. Selain itu telah dilakukan penyelidikan dan 15 Besluit adalah surat keputusan (penetapan pengangkatan resmi). (Kuswono dkk,2020:70)

Sesudah melakukan pengukuran guna mengetahui 51 titik yang tepat, lalu diambil persetujuan titik Metreum untuk sebuah kota. Dan titik itu ternyata berada di wilayah bedeng 15 Iring Mulyo. Pada hari rabu 9 Juni 1937 diresmikan pusat pemerintahan berada di Iring Mulyo yang berada di bedeng 15. Tempat ini berada ditengah-tengah antara Rancang Purwo (Pekalongan) dan Adipuro (Trimurjo) dan wilayah ini masuk kedalam Kewedanan Trimurjo. Maka Metro dijadikan Ibukota dari Kolonisasi Sukadana. Dalam waktu singkat seluruh areal kolonisasi Metro dari bedeng 1 hingga bedeng 70 telah dihuni oleh para kolonis. Bedeng 1 sampai 20 masuk kedalam wilayah Asisten Wedana Trimurjo. Sementara itu, bedeng 21 sampai bedeng 37 masuk ke dalam wilayah Asisten Wedana Pekalongan. Bedeng 38 sampai 52 masuk ke dalam wilayah Asisten Wedana Batanghari. Terakhir adalah bedeng 53 sampai 70 masuk ke dalam wilayah asisten Wedana Sekampung. (Kuswono dkk,2020:69)

Terbentuknya Metro tidak bisa dilepaskan dari campur tangan masyarakat asli Lampung, Marga Buay Nuban yang sangat berperan penting terhadap pembangunan Metro, karena Marga Buay Nuban memberikan lahannya untuk pembukaan wilayah Metro ini. Metro juga masuk kedalam ke Margaan, karena Metro termasuk wilayah dari Kolonisasi Sukadana-Trimurjo. Tetapi pada tahun 1937 wilayah Metro terlepas dari hubungan dengan Marga, Marga Buay Nuban

dan Unyi melepaskan hak adatnya mengenai pengolahan wilayah antara Trimurjo-Metro. Sehingga Kolonisasi Metro masuk dalam pemerintahan mengikuti pola dari Jawa. Terpisahnya Metro dari hubungan Marga dikarenakan tidak harmonisnya hubungan Penduduk asli dengan Kolonis Metro. Di sisi lain pemerintah Hindia Belanda juga membentuk sistem pemerintah dengan jabatan baru yaitu demang dan asisten demang. (Kuswono dkk,2020:72)

Di Metro juga dibangun Tugu untuk Rookmaker sebagai penghargaan atas keberhasilannya dalam menjalankan program Kolonisasi. Tugu ini dibangun di tengah jalan simpang empat. Beberapa bangunan juga sudah ada disana karena sudah banyak bangunan yang berbahan bagus dan kuat. Terdapat juga klinik missie para suster Khatolik Roma, sudah ada toko-toko di pasar baru di dekat rumah Wedana. Rumah sakit juga sudah dibangun dengan perlengkapan yang sederhana, Sementara Pendeta dan para suster melakukan perawatan dibeberapa titik Kolonisasi. Metro juga sudah menjadi tempat kedudukan seorang kontrolir, kantor pengurus pengairan, insinyur dan dokter pemerintah. Kolonisasi ini mempunyai 60 kelurahan, pemerintah mengupayakan untuk setiap kelurahan memiliki 500 keluarga. Pembangunan rumah inspektur dimulai pada tahun 1939, daerah Kolonisasi Metro dimaksudkan untuk menjadi subsidi terpisah dan menjadi subsidi Sukadana. Sehingga infrastruktur akan dibuat secara lengkap di Metro. (Amral Sjamsu,1956:48-49)

Jaringan Irigasi diperluas hingga ke Trimurjo-Metro, saluran utama Way Sekampung diperluas sehingga menghasilkan kapasitas yang lebih luas. Rencana awal perluasan lahan pertanian sebesar 70.000 bouw. Para penduduk juga membuat persiapan simpanan padi atau lumbung untuk persediaan saat terjadi paceklik tetapi untungnya lahan pertanian pada tahun 1940 menjadi dua kali lipat. Penanaman padi ditanah kering juga tidak pernah gagal dan pemukiman makin bertambah. Para pengusaha besar membangun pabrik penggilingan padi karena panen padi meningkat dari tahun sebelumnya (Amral Sjamsu,1956:45).

B. Etos Kerja Para Kolonis

Pelaksanaan Kolonisasi ini tidak terlepas dari bantuan para Kolonis yang didatangkan dari Jawa, mereka membantu pemerintah untuk mengerjakan program pembukaan lahan bahkan irigasi juga. Jika mereka tidak mau membantu, mereka tidak diperkenankan untuk tinggal di wilayah Kolonisasi

Sukadana, untuk itu para Kolonis ini mau membantu pekerjaan apapun. Mereka kadang diberi upah, kadang juga melakukan dengan cara bergotong royong.

1. Usaha untuk Penghidupan Para Kolonis

Pada permulaan Kolonisasi mereka diberi tanah sebesar ½ bouw, mereka membuka tanahnya dan memulai usaha. Mereka juga mencari penghasilan tambahan agar dapat mencukupi biaya kehidupannya. Tambahan penghasilan ini didapat dengan cara memburuh. Mereka menerima upah dari para kolonis lama dengan cara membantu memotong padi, atau membantu penduduk asli di kebun lada dan pekerjaan perkebunan lainnya. Tadinya keharmonisan yang terjadi antara penduduk asli dan para Kolonis tidak ada sama sekali, ini dikarenakan adanya kecemburuan sosial yang terjadi, tidak sering juga terjadi persilisihan. Tetapi lambat laun setelah penduduk asli mendapat banyak bantuan dari para Kolonis baru dalam pekerjaan di kebun ladanya dan pekerjaan lainnya, perselisihan ini makin hari makin mereda. Para Kolonis ini juga melakukan pekerjaan umum membuat jalan, saluran air, memburuh di kebun-kebun besar, yang tempatnya tidak terlalu jauh dari rumah mereka.

Tanah pekarang dan ladang para Kolonis yang terdiri dari tanah kering ini mereka tanami padi gogo. Tetapi dalam tiga tahun ternyata tidak membuahkan hasil, akhirnya tidak lama kemudian tanah itu mereka tinggalkan. Tanah yang mereka tinggalkan itu lama-lama menjadi alang-alang. Oleh sebab itu, pemerintah membuat larangan menanam padi gogo di tanah pekarangan, tetapi dianjurkan menanam pohon kelapa, jagung, kapuk, kacang-kacangan (kacang kedelai, hijau, tanah dll), sayuran dan buah-buahan. (Amral Sjamsu,1956:22)

Van Dissel menyatakan bahwa percobaan Kolonisasi Gedong Tataan dengan Kolonis yang bukan sebagian besar seorang petani tetapi kaum ploretar, boleh dikatakan berhasil. Para Kolonis yang sebagian besar bukan petani ini harus mendapatkan didikan dan pengawasan dalam usaha ini. Hingga akhir 1911 membuktikan bahwa para Kolonis ini berhasil, karena mereka mengikuti perintah yang dianjurkan oleh pemerintah dan tahun 1912 Van Dissel digantikan oleh seorang kontroliryang bernama Scheltema, ia hanya memimpin selama hampir empat bulan kemudian digantikan oleh Coomans sebagai asisten residen. Para Kolonis yang datang pada tahun 1905 berhasil menjadi petani yang berdiri sendiri. Penduduk desa Wonokrijo dan Tambakrejo adalah Kolonis-kolonis yang rajin, tetapi sayangnya tanah desa ini agak basah, sehingga

kehidupan mereka sangat terganggu, terurama kesehatan mereka. Coomans melakukan tindakan untuk memperbaiki kehidupan, yaitu :

1. Memperbaiki semua jalan di desa dan mengawasi pekerjaan Kolonis yang melakukan pekerjaan pertanian.
2. Menganjurkan kepada para Kolonis agar menanam tanaman yang bisa dijual.
3. Memberi izin kepada para Kolonis untuk bekerja di luar daerah Kolonisasi, sewaktu mereka tak memiliki pekerjaan.
4. Memimpin sendiri pemilihan calon Kolonis baru

Dengan tindakan yang dilakukan Coomans ini, kehidupan Kolonisasi makin membaik. Ia hanya memimpin sampai tahun 1915 kemudian digantikan oleh pemimpin administratur Bank Rakyat yaitu Schalkwijk. Dalam pengerjaan sawah dan ladang para Kolonis baru lebih cakap dan rajin daripada Kolonis lama. Ketika musm hujan sawah dapat ditanami dengan padi dan musim kemarau ditanami dengan tanaman kedua. Hasil pertanian pada tahun itu semakin bertambah, bukan sekedar ladang tetapi sawah juga bertambah luas, ini dikarenakan saluran irigasi yang bertambah. Hasil pertanian pada tahun 1917 lebih baik daripada hasil ditahun 1916 walaupun terjadi kegagalan karena hama tikus di sawah dan ladang seluas kurang lebih 300 bouw, hasil padi ada 38.242 pikul, untuk tahun ini bahan makanan cukup, jumlah upah para Kolonis pun dari pekerjaan di onderneming ada kurang lebih f 190.000,-- upah yang diterima dan upah dari penduduk aslipun tak sedikit. (Amral Sjamsu,1956:29)

2. Keberhasilan Para Kolonis

Pada tahun 1918 hasil pertanian kurang lebih sekitar 43.000 pikul dari luas tanah 1.853 bouw, dalam penanaman palawiya dan tembakau mendapatkan kemajuan yang besar. Kekurangan makanan pada tahun 1919 tidak ada sama sekali, dari hasil padi sekitar 4.000 pikul uangnya untuk membayar hutang kepada bank dan pajak, sedangkan hasil yang berjumlah 10.000 pikul dijual kepada karyawan kereta api Sumatera Selatan dan kebun -keun onderneming karena hasil panen ada 97.040 pikul padi dan hasil 3.024 bouw dari tanah ladang dan sawah yang para Kolonis tanami. Jumlah ternak hewan pada akhir tahun 1918 ada 1.582 ekor, dan tahun 1919 terdapat kenaikan menjadi 1.721 ekor. Jumlah pohon kelapa yang ditanami di pekarangan para Kolonis ada sebanyak 32.904 batang dan ada 4.841 batang yang sudah berbuah. Kemakmuran rakyat Kolonis ini dapat dilihat dari rumah mereka yang tadinya sederhana dan dari

gedek sekarang telah berubah menjadi rumah kayu dan atap genteng. Di Wonokerto didirikan suatu pasar yang besar dan deka pasar itu ada beberapa Kolonis lama yang mendirikan toko. Para Kolonis diharuskan membayar kembali dana dari pemerintah pada saat mereka datang dengan sistem Cuma-Cuma dan mereka diberikan pinjaman untuk membenahi rumah, dengan ini jumlah hutang para Kolonis semakin besar. Pembayaran kembali pinjaman penduduk desa baru sangat baik tetapi dengan berupa padi, kemudian padi itu nanti dipinjamkan kembali kepada Kolonis yang baru datang. (Amral Sjamsu,1956:31)

Hasil yang memuaskan pada tahun 1919 itu tadi mendorong pemerintah untuk mendatangkan para Kolonis baru dengan jumlah yang cukup besar pada tahun berikutnya. Kemudian tahun 1920 didatangkan para Kolonis baru dengan jumlah 5.010 jiwa, Kolonis ini berasal dari Kedu, Kediri, Rembang dan Jogjakarta. Keadaan badan dan sifat mereka lebih baik dari Kolonis tahun sebelumnya, terutama Kolonis dari Jogjakarta yang terdiri dari petani yang cakap. Begitu juga Kolonis bekas pekerja kuli kontrak termasuk tani yang rajin dan cakap. Hasil pertanian Kolonis pada tahun ini ada sekitar 135.000 padi basah, dari padi ini padi sebanyak 47.000 diserahkan kepada pemerintah untuk penyicilan hutang para Kolonis dan 10.000 pikul dibeli oleh Bank untuk memberi makan para Kolonis baru. (Amral Sjamsu,1956:32)

Pekerjaan pengeringan rawa-rawa, penggalian saluran, perbaikan irigasi dan pekerjaan lainnya dilakukan oleh para Kolonis dengan cara bergotong royong, karena itu hasil pertanian meningkat, peternakan juga terus berkembang sehingga menghasilkan penghasilan yang cukup lumayan. Karena keadaan produksi yang baik pada tahun 1929 maka perdaganganpun mulai ramai, terutama perdagangan padi, kopra, kayu, rotan, jagung dan bahan pakaian. Sampai akhir tahun 1931 jumlah Kolonis di Gedong Tataan 29.863 jiwa.

C. Interaksi Sosial di Kolonisasi Sukadana

1. Konflik Sosial

Sejak tahun 1905 di daerah-daerah Kolonisasi pertanian di luar Jawa mulai muncul keresahan sosial. Karena ada suatu kelompok yang diuntungkan atau dirugikan dari dampak Kolonisasi tersebut. Pertama karena masalah tanah, karena lokasi tanah para Kolonis ini yang berhempitan dengan tanah penduduk asli. Kedua karena rasa cemburu penduduk asli Lampung kepada Kolonis yang mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah. Hubungan para kolonis dengan penduduk asli Lampung tidak begitu harmonis. Hal ini disebabkan

perlakuan yang berbeda dari pemerintah Belanda. Para Kolonis diberi fasilitas tempat tinggal dan lahan pertanian, sementara penduduk asli tidak sama sekali bahkan lahan pertanian mereka berkurang sebagai lahan pertanian.

Akan tetapi setelah jumlah migran pertanian orang Jawa semakin bertambah banyak, sehingga terjadi keresahan sosial yang bisa menjurus pada munculnya konflik sosial. Pada tahun 1910 menurut Schalkwijk di Gedong Tataan, telah terdapat isu mengenai persoalan perbatasan. Penduduk asli (lokal) merasa daerah lahan pertaniannya telah terdesak oleh penduduk migran. Peristiwa itu dipicu oleh dikeluarkannya surat dari Gouverment Secretaris (Sekertaris Gubernur) pada tanggal 6 November 1914 tentang pembukaan desa baru untuk penempatan calon migran di areal tanah yang kosong. Keresahan sosial itu berkembang menjadi konflik setelah peraturan itu dipraktekan. Pembukaan desa baru ini mendapat perlawanan dari penduduk asli yang sangat taat akan hukum adat yang berlaku di dalam adat marga desa, sehingga terjadi bentrok antara migran dan penduduk asli. Penduduk asli mengalami keberatan atas pembukaan daerah baru ini, karena mereka khawatir tanahnya menjadi sempit. Gangguan dari penduduk asli selalu datang, diantaranya dengan membuat persoalan seperti mencuri ternak atau tanaman dan juga merampok para kolonis. Namun konflik perebutan perbatasan ini tidak terjadi secara berkepanjangan, karena dengan cepat konflik ini diatasi oleh aparat keamanan pemerintah setempat. (Sudarno,2019:141)

Peristiwa lain juga terjadi di desa sekitar perusahaan Swasta. Para pemilik perusahaan swasta itu menguasai lahan yang belum dikerjakan oleh penduduk lokal tanpa izin kepada kepala desa, tetapi langsung kepada pemerintah Kolonisal setempat. Hal ini menilbulkan kebencian penduduk asli terhadap pemerintah swasta, sehingga terjadi pembunuhan terhadap keluarga pemilik perusahaan. Dalam tahun 1926-1930 terjadi peningkatan pembunuhan terhadap orang Eropa hingga 400%. (Sudarno,2019:141-142)

2. Hubungan Penduduk Asli dan Para Kolonis

Setelah terjadi bebarapa konflik antara penduduk asli dan para Kolonis akhirnya lama kelamaan keributan ini semakin mereda. Ini dikarenakan mereka hidup berdampingan dan memiliki hubungan simbiosis-mutualisme. Penduduk asli juga mendapat banyak bantuan dari para Kolonis baru karena Kolonis baru bekerja kepada para penduduk asli terutama dalam pekerjaan di kebun ladanya dan pekerjaan lainnya, perselisihan ini makin hari makin mereda. Para Kolonis

ini juga melakukan pekerjaan umum membuat jalan, saluran air, memburuh di kebun-kebun besar, yang tempatnya tidak jauh dari tempat tinggal mereka dengan bekerja sama dengan para penduduk asli. Penduduk asli juga mengikuti cara kerja petani dari Jawa dalam proses mengolah sawa h atau ladang dengan alat cangkul dan ani-ani.

D. Kebudayaan di Daerah Kolonisasi Sukadana

Suku Lampung mempunyai kebudayaan tersendiri dan identitas tersendiri pula. Mereka mempunyai adat istiadat sendiri yang masih dijalankan sampai saat ini, dan mereka mengikuti hukum adat yang masih berlaku. Karena walaupun bertentangan dalam penerapan budaya, sebenarnya nilai-nilai budaya yang beragam tersebut bermuara pada satu tujuan yaitu mendapatkan ketentraman dan keselarasan.

1. Pengaruh Kebudayaan

Perpindahan penduduk dari daerah asal yang beretnis tertentu ke daerah tujuan yang memiliki etnis tersendiri dalam proses bermasyarakat menimbulkan pembaruan dalam aktivitasnya atau tercipta keadaan budaya yang homogen. Pembauran ini adalah proses sosial alami. Perbedaan sifat dan sikap saling bertemu mencari kesesuaian dalam interaksi untuk mencapai hasil yang diinginkan bersama. Akan tetapi persoalan budaya memiliki perbedaan yang signifikan. Budaya masyarakat pendatang berbeda dengan budaya masyarakat setempat dan dalam praktiknya masing-masing etnik melaksanakan budaya sesuai dengan panutan masing-masing, sehingga sangat sulit disatukan, tetapi dalam interaksi untuk menyatukan kondisi ini dibutuhkan suatu integrasi sehingga menciptakan homogenitas. Inilah yang disebut kesepahaman di balik perbedaan tersebut. Dampak lain adalah telah terjadi pencampuran penganut budaya pada satu tempat yang luas atau terjadi multikulturalisme yang disebabkan pelaksanaan program pemerintah, yaitu Kolonisatie dan transmigrasi. (Halwi Dahlan,2014)

Saling pengertian sudah terjalin sedemikian rupa, perkawinan campuran juga telah terjadi, beberapa sektor birokrasi di tingkat kecamatan dan kabupaten terjadi percampuran etnis dengan harmonis. Kesimpulannya kehidupan multikultur telah terjalin dengan semestinya. Dari kondisi ini kekuatiran terhadap akan terjadinya disintegrasi multikultur tampaknya tidak mungkin, selama

kehidupan berjalan “seimbang” antara penduduk asli dengan pendatang. Semuanya pun sepakat menyebut diri sebagai orang Lampung.

Tetapi penduduk asli juga tidak mencapuri kebudayaan yang telah dibawa oleh para Kolonis. Bahkan para marga ini tidak campur tangan dalam adat istiadat masyarakat Kolonis dan susunan pengurus desa, tetapi para marga hanya campur tangan dalam mengurus hak dan penerimaan uang. Dalam hal penyerahan kemargaan ini mengalami sedikit kesulitan mengenai hak tanah. Akhirnya Pemerintah memberikan solusi atas hak tanah yaitu dengan cara hak tanah perseorang diturunkan secara turun menurun, dan mereka diberikan hak surat tanah dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan. Kesediaan orang Lampung menerima para pendatang di tengah-tengah mereka juga patut dihargai, karena sekalipun berbeda latar belakang budaya, ternyata mereka dapat beradaptasi. Di masa kini para keturunan kolonisasi ataupun transmigrasi sudah mengakui diri sebagai warga setempat atau telah menjadi “Orang Lampung”. (Amral Sjamsu,1956 dan Halwi Dahlan,2014)

Namun pengaruh dari pendidikan barat (Belanda), kalangan yang mendapat kesempatan untuk belajar menggunakan bahasa Lampung dengan dicampuri bahasa Belanda. Terutama pada golongan elite, jadi hal ini hanya menyentuk lapisan tipis dari masyarakat pribumi. Dalam bidang kesenian seperti seni tari, pahat dan ukir pengaruh kebudayaan asing hanya sedikit sekali. Sekitar tahun 1935 ada gedung kesenian dengan nama “Societeit” di Tanjungkarang. Hanya keluarga bangsa Belanda saja yang memanfaatkan gedung ini. Penduduk pribumi tidak boleh sama sekali menggunakan bahkan untuk mendekati gedung ini. Apabila ada orang pribumi yang melirik ke gedung ini maka mereka disuruh pergi. Pada waktu itu hanya ada dua orang pribumi yang boleh mengikuti acara-acara tersebut yaitu Dr. Kajat yang pandai memainkan piano dan Dr. Harun Nasution. (Bukri dkk,1977/1978:116-117)

2. Kebudayaan Para Kolonis di Daerah Kolonisasi

Para Kolonis Jawa yang berada di wilayah Kolonisai Sukadana melakukan berbagai kebudayaan yang ada di Jawa. Para pegiat mempertahankan dan melestarikan kebudayaan yang mereka bawa dari Jawa seperti, Wayang Kulit, Jatilan, Reog, dll. Sultan Yogyakarta juga memberikan hadiah kepada para Kolonis di Keresidenan Lampung sebagai upaya untuk para Kolonis agar tetap membawa budaya dan melestarikan budaya mereka dari

Jawa. Tepatnya hari jumat pada tanggal 3 Juni utusan dari Sultan Yogyakarta tiba di Pelabuhan Panjang, yang terdiri dari Bupati dan Raden Ayu. Selain ini Sultan juga mengunjungi tempat perkampungan tempat Kolonisasi. Sekitar jam 11.00 pagi para rombongan tiba di Metro. Gamelan akan diserahkan di Passanggrahan Hansje, gamelan ini suda h tertata rapi dan ditutupi kain merah. Para kepala kampung berpakaian rapi dan mengenakan tanda-tanda kehormatan mereka dan membuat sembah yang rendah hati ketika rombongan mendekat. Setelah semuanya sudah datang, Bupati dari Bantul memberikan pidato yang intinya menyampaikan salam dari Sultan Yogyakarta kepada Residen Distrik Lampung. (Kuswono dkk,2020:93-94)

E. Layanan Kesehatan

Pada saat pemukiman baru dibuka oleh pemerintah untuk para Kolonis baru yang akan didatangkan, penyakit malaria muncul dan menganam pemukim baru terutama anak-anak. Sebagai bagian dari pelayanan misi Katolik menawarkan bantuan dengan mendatangkan dokter serta perawat pemerintahan. Pemimpin baru nyang menggantikan H.G Heyting yaitu Van Dissel tinggal di desa Bagelen bersama mantri Kolonisasi pertama. Di Desa ini pula didirikan rumah sakit untuk para Kolonis. Pada akhir tahun 1914 semua Kolonis mendapat suntikan umum dari dokter pemerintah yang baru diangkat, Kesehatan mereka mulai lebih diperhatikan, sehingga angka kematian menurun menjadi 29,45 promil yang tadinya 44,43 promil pada tahun ini. Dalam tahun 1917 anak-anak terkena penyakit cacar yang banyak memakan korban dan tidak kurang 130 anak meninggal dunia. Angka kematian pada tahun ini mencapai 293 orang atau 3,72%, angka kematian ini lebih besar dari tahun sebelumnya. (Amral Sjamsu,1956:29)

Pada tahun 1919 jumlah Kolonis yang akan didatangkan dari Jawa lebih besar, sehingga jika salah satu calon Kolonis baru ini terjangkit penyakit disentri, mereka dikirimkan dulu kepulau Ornust untuk diperiksa dan diberi suntikan untuk pemberantasan penyakit tifus dan kolera. Di desa lama periksaan kesehatan diperkeras karena angka kematian tetap tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya, terutama untuk para calon Kolonis baru. Angka kematian di desa lama dikarenakan penyakit influenza, sedangkan di desa baru disebabkan karena disentri dan malaria. Dalam tahun ini angka kematian meningkat menjadi 892 orang dan ketika tahun 1918 ada 483 orang. Sebanyak 3341 jiwa di tempatkan pada tahun 1921, walaupun pada tahun ini penyakit disentri masih banyak

menelan korban dan tidak sedikit menelan biaya untuk pemberantasannya, tapi berkat diperkerasnya penjagaan kesehatan dan dipertertib, angka kematian pada tahun ini tidak tinggi. Kolonis yang mati ada 802 orang. (Amral Sjamsu,1956:30-32)

Dalam tahun 1929 tidak kurang dari 662 orang yang mati karena penyakit malaria, yaitu di Gedong Tataan ada 592 orang dan di Wonosobo ada 70 orang. Sebelum ini pernah pula terjangkit penyakit disentri pada tahun 1919, dengan jumlah korban sebanyak 892 orang. Dalam lapangan kesehatan di tanah Kolonisasi, pimpinan dipegang oleh Rumah Sakit Pusat di Tanjung Karang. Pemberatasan penyakit menular selalu dilakukan, terutama pada calon Kolonis baru yang akan datang. Untuk itu pemerintah membagikan secara Cuma-Cuma kepada para Kolonis Pil Kina kepada lurah yang akan dibagikan secara rata dan pada Kolonis yang sakit. Departemen kesehatan masyarakat memberikan sebanyak 80.000 tablet Pil Kina dalam setahun dan memberikan petunjuk perawatan juga pada Kolonis yang terjangkit malaria. Lambat laun keadaan kesehatan di tanah-tanah Kolonisasi semakin baik, berkat perluasan kesehatan yang diadakan dinas kesehatan. (Kuswono dkk,2020:106 dan Amral Sjamsu,1956:37)

Menurut Kuswono dkk (2020:107) :

> “Di Kolonisasi Metro pusatnya para suster terus bekerja dan misi berjalan berkat bantuan baik pemerintah. Melalui Residen Rookmaker disiapkan sebidang tanah untuk mendidikan tempat ibadah, perumahan bagi suster, klinik dean rumah sakit. Para suster di Metro mendapat bayaran sekitar 40 sen untuk 10 pasien di rumah sakit. Selain itu diberikan gaji sebesar 30 gulden/bulan untuk suster yang melakukan klinik rawat jalan dan keperawatan distrik pedalaman termasuk sekitar Simbarwaringin. Dokter pemerintah daerah yakni dr. Ehlhardt, melakukan banyak hal untuk para Kolonis yang sakit. Meskipun ia tidak diwajibkan untuk melakukannya, namun ia mengunjungi para pemukim yang sakit sampai di gubuk para Kolonis. Diketahui dr. Ehlhardt sebagai seorang Inspektur yang sedang maninjau keterlaksanaan program Kolonisasi.”

Dengan ini disimpulkan bahwa kesehatan atas program Kolonisasi berjalan baik dengan bantuan pemerintah dan Misi Katolik juga yang turut membantu. Para suster juga tidak semata-mata membantu secara Cuma-Cuma, tetapi mereka turut digaji.

Dalam tahun 1941 telah ada dua orang dokter di Metro, 13 mantri jururawat, 80 pembagi klinik, dua pembantu klinik dan satu bidan. Seluruh pegawai kesehatan itu untuk Kolonisasi Sukadana, kecuali seorang mantri malaria dan 11 pembagi klinik yang ditugaskan untuk Kolonis-kolonis kecil

lainnya. Tetapi tanah-tanah Kolonisasi kecil ini sewaktu-waktu masih didatangi oleh para dokter. Ada 20 buah poliklinik kepunyaan misi Katolik dan pemerintah dan 2 rumah sakit juga. Penjagaan kesehatan di seluruh tanah Kolonisasi di keresidenan Lampung dipegang oleh dokter keresidenan. (Amral Sjamsu,1956:48)

F. Layanan Pendidikan

Tidak hanya diberikan fasilitas kesehatan saja, tetapi para anak-anak dari Kolonis Jawa diberikan pendidikan juga di Kolonisasi. Institusi pendidikan menjadi suatu hal yang penting setelah kebutuhan pokok. Tak banyak diketahui, jika cikal bakal sekolah di Indonesia, merupakan warisan dari sistem pendidikan ala Barat yang diusung oleh Belanda. Diskriminasi dalam lingkup sekolah merupakan hal yang lumrah terjadi pada saat itu. Antara penduduk pribumi dan warga Belanda, terdapat kesenjangan yang cukup lebar. Di tengah kemiskinan rakyat akibat penjajahan, hanya segelintir orang Indonesia yang beruntung mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Belanda. Selain sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah, pemerintah juga membangun sekolah yang berbasis keagamaan seperti sekolah Missie Katolik dan sekolah Muhammadyah.

1. Pendidikan Para Kolonis Jawa di Kolonisasi Sukadana

Fasilitas pendidikan yang dibangun dulunya hanya untuk anak-anak pejabat Belanda dan sebagian pribumi. Fasilitas pendidikan yang dibangun oleh pemerintah dibedakan atas dua jenis, yaitu :

1. Kusus bagi anak-anak pejabat Belanda yang tinggal di wilayah Kolonisasi Sukadana.
2. Sekolah rakyat untuk penduduk pribumi atau warga Kolonis.

Pemerintah Belanda juga membatasi pemberian materi pembelajaran untuk anak-anak pribumi yaitu hanya membaca dan menghitung. Adapun jenjang pendidikan pada masa kependudukan Belanda sebagai berikut :

a. Sekolah kelas dua (Tweede Inlandsche School) atau setingkat dengan SD dengan masa pendidikan tiga tahun. Materi yang diberikan berupa menulis, membaca dan menghitung.
b. Bagi golongan menengah melanjutkan sekolah ke HIS (Hollandsch Inlandsche School).
c. Setelah HIS melanjutkan ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwujs) atau setingkat dengan SMP.

d. Setelah MULO melanjutkan ke AMS (Algemeene Middeelbaere School) atau setingkat dengan SMA.
e. Bagi anak-anak pejabat Belanda mereka melanjutkan ke HBS (Hogere Burger School) setingkat dengan SMA.

Selain sekolah-sekolah ini, pemerintah juga mendirikan sekolah yang berbasis keagamaan seperti Missie Katolik dan sekolah Muhammadyah. Sekolah Missie mendapat jumlah murid yang lebih banyak, karena dukungan dari pemerintah Hindia Belanda pada masyarakat.

2. Persyarikatan Muhammadyah

Sejak tahun 1912 pergerakan Muhammadyah menunjukan perkembangan yang pesat dan juga menjelma menjadi sebuah persyarikatan yang besar. Berbagai cabang persyarikatan Muhammadyah sudah tersebar keseluruh Indonesia bahkan hingga ke negara tetangga. Muhammadyah telah masuk keseluruh wilayah di Sumatra pada tahun 1920-an termasuk di Kota Metro. Persyarikatan Muhammadyah cabang Metro adalah cabang yang pertama kali berdiri di daerah Lampung. Pada saat Metro dibuka sebagai daerah Kolonisasi, ada beberapa kader Muhammadyah dari Jawa yang ikut berkolonisasi di Metro. Pada tahun 1938 mulailah timbul pemikiran untuk kemungkinan dapat dirintis berdirinya Muhammadyah, dan sampai memiliki cabang. (Kuswono dkk,2020:110)

Tokoh-tokoh pendiri Persyarikatan Muhammadyah cabang Metro ini adalah: Bapak M.Chajad, Bapak Sosro Sudarmo, Bapak Abdullah Sajad dan Bapak Ki M.Asrof. Usaha untuk mendirikan persyarikatan Muhyammadyah ini dengan cara menarik beberapa orang untuk dijadikan calon anggota yang nantinya dijadikan sebagai pengurus. Banyak sekali kesulitan yang terjadi, salah satunya dengan masyarakat dan pergaulan, tempat tinggal, keadaan alam, serta tentang persyarikatan ini sendiri, karena nama ini sangat asing dimasyarakat. Selain itu para tokoh melakukan pendekatan kemasyrakat dengan cara sebagai berikut :

1. Para Tokoh giat melakukan dakwah Islam melalui cara seperti, Khitanan, perkawinan, kematian dan peringatan hari besar umat islam.
2. Penyampaian tentang persyarikatan Muhammadyah dilakukan dengan sangat hati-hati, dan diperkenalkan secara tidak langsung.

Langkah pengenalan Muhammadyah ini dilakukan dengan cara tersebut agar masyarakat mau menerima dengan tujuan Muhammadyah itu sendiri, karena muhammadyah ingin agar masyarakat melakukan ajaran islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist dari masalah akidah, dari cara menggunting rmbut dan kuku, hingga mendirikan rumah, dan seterusnya sesuai ajaran Islam. Sehingga baru pada tahun 1939 persyarikatan Muhammadyah di Metro sudah dapat berdiri dengan kepengurusan sebagai berikut :

Ketua : Bapak Sosro Sudarmo
Wakil Ketua : Bapak M. Chajad
Pengurus Lain : Bapak Abdullah Sajad, Bapak Ki M.Asrof, Bapak Ngali, Bapak Muhajir dan Bapak Seno Hadipuspito.

Hingga pada tahun 1942 yang di mana Jepang menduduki wilayah Kolonisasi Sukadana, dengan ini para tokoh pendiri dan pengurus Muhammadyah gugur dalam peristiwa Agresi Militer II di Metro pada tanggal 09 Februari 1949.

G. Segi Pedagogisnya

Pada bab ini, bidang sosial termasuk dalam pembahasan yang sangat penting dan saling berkaitan dengan bidang budaya. Di mana dalam kebudayaan pasti ada tindakan sosial di dalamnya, oleh sebab itu bidang sosial dan budaya tidak dapat dipisahkan. Penduduk asli sangat berperan penting atas berjalannya program ini, yang awalnya merea sangat tidak suka atas kehadiran dari para Kolonis baru sehingga menimbulkan banyak kekacauan, akhirnya lambat laun permasalahan ini berkurang, karena para penduduk asli membantu para Kolonis baru untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dengan cara mempekerjakan mereka di sawah dan ladang mereka. Selama program Kolonisasi ini berlangsung di Sukadana, Pemerintah dan missie Katolik memberikan sarana atas layanan kesehatan dan pendidikan.